

SKRIPSI

DETERMINAN *FISCAL STRESS* KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

**RYAN RENALDI
A031201003**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

DETERMINAN *FISCAL STRESS* KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

RYAN RENALDI
A031201003



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

DETERMINAN *FISCAL STRESS* KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

disusun dan diajukan oleh

RYAN RENALDI
A031201003

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Mei 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CWM
NIP. 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
NIP. 19641012 198910 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

DETERMINAN FISCAL STRESS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

disusun dan diajukan oleh

RYAN RENALDI
A031201003

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 13 Juni 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CWM	Ketua	1..... 
2.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA	Anggota	3..... 
4.	Haniek Khoirunnisa Baja, S.E., M.Sc	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Ryan Renaldi

NIM : A031201003

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Determinan Fiscal Stress Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Ryan Renaldi

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Deterimanan *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Sukardi dan Ibu Rosliani yang senantiasa mendoakan dan mendukung segala langkah yang ingin peneliti tempuh. Penulis sangat bersyukur karena terlahir dari keluarga sederhana yang sangat *open minded* tentang pendidikan.
2. Saudara kandung penulis, Muhammad Yusran dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CWM selaku dosen pembimbing utama dan Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
4. Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen penguji yang telah membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

5. Haniek Khoirunnisa Baja, S.E., M.Sc selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
9. Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas yang telah menjadi rumah terbaik bagi peneliti untuk berproses dan berkembang selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman IN20NATION (Akuntansi angkatan 2020) yang telah menjadi rekan seperjuangan peneliti selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
11. Sahabat Barudak Well; Kak Hamza, Nida, Amay, Miftah, Khaerina, dan Rey yang senantiasa memberikan energi positif dan mendengarkan seluruh keluh kesah penulis.
12. Sahabat Ramsis Empire; Ahlul, Dahlan, Ihya, Iqbal, Rafly, Danil, dan Hendra yang telah menjadi teman tinggal dan bermain penulis selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
13. Tim LeafyCo; Ihsan, Mihil, Kia, dan Yasmi yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam kegiatan P2MW hingga KMI Expo.
14. Teman-teman Posko 5 KKNT Gelombang 110 Kelurahan Borong Rappoa yang mewarnai hari-hari peneliti selama ber-KKN.

15. Keluarga CEMARA posko kelurahan Laliko yang menjadi rekan seperjuangan dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat.
16. Teman-teman MSIB batch 4 PT Mamminasata Syariah Propertindo dan MSIB Cycle 6 Telkomsel.
17. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada Almamater Kampus Merah Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Mei 2024

Ryan Renaldi

ABSTRAK

Determinan *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat

Determinants of District/City Fiscal Stress in West Sulawesi Province

Ryan Renaldi

Mediaty

Amiruddin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD, belanja modal, pertumbuhan PDRB, dan indeks pembangunan manusia terhadap *fiscal stress*. Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2021 dengan total sampel sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota yang dipilih menggunakan teknik *sampling* jenuh. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, pertumbuhan belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*, sedangkan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, pertumbuhan PDRB, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Kata Kunci: PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, *Fiscal Stress*

This research aims to test and analyze the influence of PAD, capital expenditure, GRDP growth, and human development index on fiscal stress. The object of this research is the district/city government in West Sulawesi Province in 2017-2021 with a total sample of 6 (six) districts/cities selected using saturated sampling techniques. The data in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency website. This research uses multiple linear regression analysis. The results of this research show that PAD and GRDP growth have a negative effect on fiscal stress, capital expenditure growth has a positive effect on fiscal stress, while the human development index has no effect on fiscal stress. The results of this research also show that PAD, capital expenditure, GRDP growth, and the human development index jointly influence fiscal stress.

Keywords: PAD, Capital Expenditure, GDRP Growth, Human Development Index, *Fiscal Stress*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Peacock dan Wiseman	12
2.1.1 <i>Fiscal Stress</i>	13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.3 Belanja Modal	16
2.1.4 Pertumbuhan PDRB	16
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Konseptual	21
2.4 Hipotesis Penelitian	22
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap <i>Fiscal Stress</i>	22
2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i>	23
2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap <i>Fiscal Stress</i>	24

2.4.4	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap <i>Fiscal Stress</i>	25
2.4.5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap <i>Fiscal Stress</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Rancangan Penelitian	28
3.2	Tempat dan Waktu	29
3.3	Populasi dan Sampel	29
3.4	Jenis dan Sumber Data	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	30
3.6.1	Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)	30
3.6.2	Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)	31
3.7	Analisis Data	34
3.7.1	Analisis Statistik Dekskriptif	34
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	35
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda	37
3.7.4	Uji Hipotesis	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.2	Analisis Statistik Dekskriptif	40
4.3	Hasil Analisis Data	43
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	43
4.3.2	Regresi Linear Berganda	46
4.3.3	Uji Hipotesis	48
4.4	Pembahasan	51
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap <i>Fiscal Stress</i>	51
4.4.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i>	53
4.4.3	Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap <i>Fiscal Stress</i>	54
4.4.4	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap <i>Fiscal Stress</i>	55
4.4.5	Pengaruh PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap <i>Fiscal Stress</i>	56

BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Data Perbandingan PAD dan Pendapatan Transfer 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021	4
1.2. Kerangka Konseptual	21
4.1. Hasil Uji <i>Normal Probability Plot</i>	43
4.2. Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia	19
4.1. Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel	41
4.2. Hasil Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	44
4.3. Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
4.4. Hasil Uji Autokorelasi.....	45
4.5. Hasil Regresi Linear Berganda.....	45
4.6. Hasil Uji Statistik t.....	48
4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	50
4.8. Hasil Uji Statistik F	50
4.9. Hasil Uji Hipotesis	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis.....	67
Lampiran 2 Data Variabel Tahun 2017-2021.....	68
Lampiran 3 Hasil Olah Data (Output SPSS).....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2001 yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan fiskal di daerah, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan program-program pembangunan dan perencanaan lainnya dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Christia, 2019).

Khusaini (2018) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangannya secara mandiri melalui mekanisme perencanaan yang efektif dan efisien sehingga seluruh potensi keuangan daerah dapat dioptimalkan. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, mereka harus berinisiatif untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah melalui sumber daya keuangan yang ada di daerahnya sendiri. Hanya terdapat tujuh provinsi dan tiga

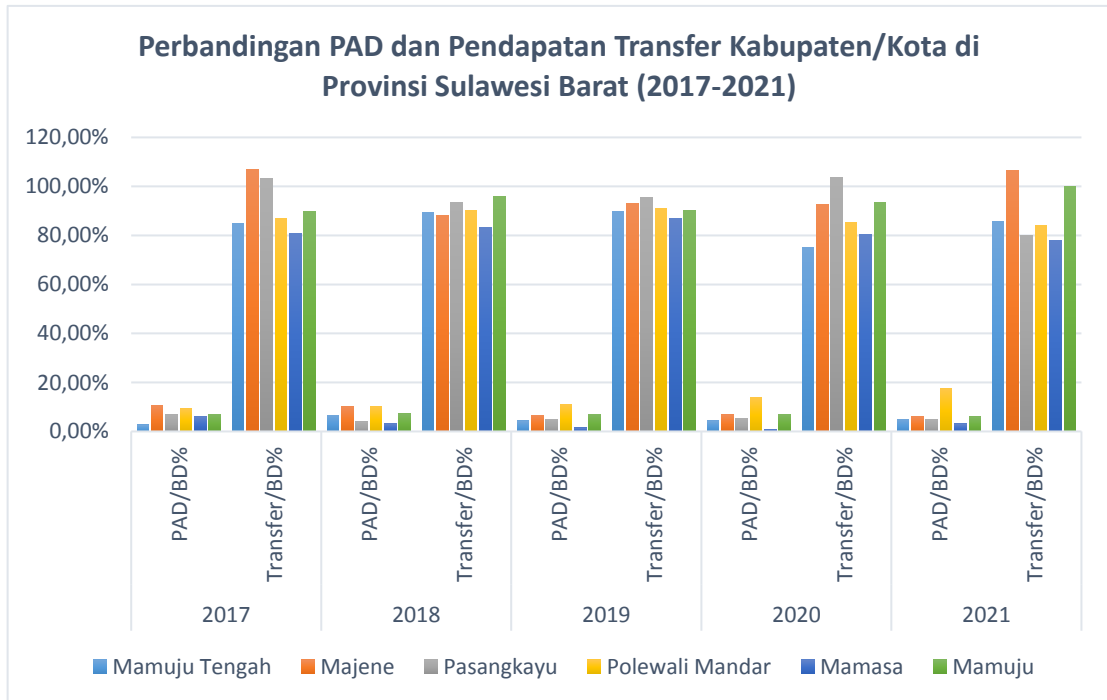
kabupaten/kota yang dinyatakan mandiri secara fiskal pada tahun 2020 (BPK-RI, 2021). Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri selanjutnya disebut dengan *fiscal stress*.

Fiscal stress merupakan kondisi ketika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanjanya dan melakukan pelayanan publik karena gagal memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Arnett (2011) mendefinisikan *fiscal stress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang timbul dan disertai dengan ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan. *Fiscal stress* secara umum dapat dipahami sebagai kegagalan aktual atau potensial suatu pemerintah dalam memenuhi satu atau lebih kondisi solvabilitas, keberlanjutan, fleksibilitas, dan kerentanan terhadap kesehatan fiskal (Levine *et al.*, 2013).

Penyebab dari *fiscal stress* yaitu terbatasnya penerimaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kemandirian daerah. *Fiscal stress* juga dapat terjadi apabila pemerintah daerah mengalami penurunan jumlah penerimaan namun di waktu yang bersamaan permintaan layanan pemerintah daerah justru mengalami peningkatan. Maher dan Deller (2007) menyatakan bahwa *fiscal stress* terjadi karena layanan yang diharapkan dari pemerintah daerah sudah semakin kompleks namun sumber penerimaan daerah masih terbatas. Layanan yang diharapkan dari pemerintah tidak hanya terbatas pada pendidikan yang berkualitas tetapi juga perlindungan keamanan, layanan transportasi, layanan perawatan kesehatan, serta berbagai jenis layanan lainnya sedangkan penerimaan daerah masih sangat bergantung pada penerimaan pajak.

Shamsub dan Akoto (2004) dalam penelitiannya mengemukakan tiga penyebab terjadinya *fiscal stress*. Pertama, siklus ekonomi menjadi penyebab terjadinya *fiscal stress*, misalnya pertumbuhan yang lambat dan resesi. Kedua, kurangnya insentif bisnis dan penurunan industri menjadi penyebab terjadinya *fiscal stress*. Dalam hal ini, penurunan industri menyebabkan penurunan pendapatan pajak dan menyebabkan peningkatan permintaan layanan sosial sehingga terjadi *fiscal stress*. Ketiga, faktor politik dan fiskal yang tidak terkendali menjadi penyebab terjadinya *fiscal stress*. Dalam hal ini, *fiscal stress* disebabkan oleh inefisiensi birokrasi, korupsi, tingginya upah pegawai, dan tingginya belanja. Sementara itu, Skidmore dan Scorsone (2011) menyatakan bahwa terjadinya *fiscal stress* sebagian besar disebabkan oleh keputusan pemerintah, misalnya pengelolaannya yang buruk sehingga dapat menyebabkan tantangan fiskal yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai terobosan dalam menekan angka *fiscal stress* dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan pemerintah daerah yang diindikasikan berpengaruh terhadap *fiscal stress*. PAD terutama pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan menurunkan tingkat *fiscal stress* sehingga akan tercapai kondisi *fiscal health* (Manafe dkk., 2018). Oleh karena itu, PAD diharapkan menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, kontribusi PAD terhadap total penerimaan maupun belanja daerah masih sangat rendah, sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1. 1 Data Perbandingan PAD dan Pendapatan Transfer 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021

Data pada Gambar 1.1. menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap total belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017-2021 hanya sebesar 6,68% dengan rincian Kabupaten Mamuju tengah sebesar 4,60%, Kabupaten Majene sebesar 8,07%, Kabupaten Pasangkayu sebesar 5,20%, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 12,38%, Kabupaten Mamasa sebesar 2,93%, dan Kabupaten Mamuju sebesar 6,88%. Sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap total belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017-2021 mencapai angka 90,11% % dengan rincian Kabupaten Mamuju tengah sebesar 84,91%, Kabupaten Majene sebesar 97,47%, Kabupaten Pasangkayu sebesar 95,11%, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 87,45%, Kabupaten Mamasa sebesar 81,86%, dan Kabupaten Mamuju sebesar 93,87%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah pada kenyataannya memiliki kontribusi yang sangat rendah dan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi sehingga kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai *fiscal stress*. Rendahnya PAD menyebabkan daerah-daerah akan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat menyebabkan gejala *fiscal stress* (Al-Hadar dkk., 2020). Dalam rangka mendukung kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama bagi APBD sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu tuntutan utama bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan desentralisasi fiskal yaitu peningkatan pelayanan publik. Hastuti (2018) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dapat terus dilakukan selama masih didukung dengan pembiayaan daerah yang memadai karena pelayanan publik yang memadai harus didukung dengan fasilitas publik yang memadai pula. Pada umumnya, jenis belanja yang digunakan untuk pengadaan fasilitas publik yaitu belanja modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja pembangunan seperti halnya belanja infrastruktur akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila belanja daerah atau belanja modal mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan tersedianya pembiayaan pembangunan yang besar pula, maka akan muncul gejala *fiscal stress*. Dalam hal ini, *fiscal stress* digambarkan dengan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Shamsud dan Akoto (2004) menyatakan bahwa belanja daerah yang tinggi erat kaitannya dengan tingkat *fiscal stress* yang tinggi pula.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu hal yang diindikasikan berpengaruh terhadap kondisi *fiscal stress* suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi mengalami peningkatan yang dibersamai dengan peningkatan kesejahteraan (Septira dan Prawira, 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Laju PDRB Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 berada pada angka 2,30%, lebih rendah dari laju PDRB nasional yang berada pada angka 5,31%, dan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB kedua di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai determinan *fiscal stress* yang menjadikan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan pertumbuhan PDRB sebagai variabel independennya. Penelitian yang dilakukan oleh Septira dan Prawira (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah/kota maka angka *fiscal stress* akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa dkk. (2021) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Selanjutnya, Sanjaya dkk. (2021) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan PAD, PDRB dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel independen selanjutnya dari penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Semakin baik capaian mutu sumber daya manusia sebagai modal dalam pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi akan terwujud (Wididarma dan Jember, 2021). Dalam hubungannya dengan *fiscal stress*, Anggraeni (2017) mengungkapkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia suatu wilayah akan menyebabkan penurunan tingkat *fiscal stress* pada wilayah tersebut. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga dikaitkan dengan kinerja keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta keterampilan penyusunan laporan anggaran yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan.

Penelitian tentang *fiscal stress* sangat penting bagi tingkat pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengalami gejala *fiscal stress* dan sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerahnya. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan

transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah masih mengalami ketimpangan yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *fiscal stress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Septira dan Prawira (2019) tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi *fiscal stress*. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia. Provinsi Sulawesi Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena provinsi ini merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia dengan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dan laju pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah. Dalam penelitian ini, penulis turut menambahkan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen karena penelitian sebelumnya yang membahas dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap *fiscal stress* masih sangat sedikit, khususnya pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait fenomena *fiscal stress* yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017-2021. Variabel independen yang diindikasikan berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat?
5. Apakah pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis.

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pengaruh belanja modal terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

5. Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *fiscal stress* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan keuangan daerah agar gejala *fiscal stress* dapat dikurangi.

2. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan meninjau kondisi *fiscal stress* beserta faktor-faktor empiris yang memengaruhinya.

3. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik *fiscal stress*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peacock dan Wiseman

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori Peacock dan Wiseman karena teori tersebut merupakan teori yang berkaitan dengan anggaran suatu daerah yang berfokus pada masalah *fiscal stress*. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan meningkatkan penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak meskipun hal tersebut sangat tidak disukai oleh masyarakat. Menurut teori Peacock dan Wiseman, pada suatu tingkat toleransi tertentu masyarakat bersedia untuk membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah meskipun jumlahnya cukup besar. Namun pemerintah harus tetap berhati-hati karena masyarakat akan enggan untuk membayar pajak apabila jumlahnya melebihi batas toleransi yang mereka miliki (Nahumuri, 2019).

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesebroto:173).

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Hal ini terjadi karena adanya tingkat toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah maka penerimaan pemerintah akan menurun sehingga pemerintah juga tidak bisa meningkatkan

pengeluarannya. Fenomena tersebut erat kaitannya dengan kondisi *fiscal stress* yaitu kondisi ketika penerimaan pemerintah yang terbatas diiringi dengan kebutuhan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat. Kondisi *fiscal stress* yang tidak terkendali pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran.

2.1.1 Fiscal Stress

Arnett (2011) mendefinisikan *fiscal stress* sebagai tekanan fiskal (anggaran) yang terjadi sebagai akibat dari keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam spektrum kondisi keuangan publik, *fiscal stress* dapat dikategorikan sebagai *weak financial condition* (kondisi keuangan publik yang lemah). *Fiscal stress* adalah konsep yang berusaha mengukur sejauh mana pemerintah daerah berada dalam bahaya krisis fiskal yang memerlukan adanya campur tangan oleh pemerintah pusat, terutama tindakan yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan suatu daerah (Bradbury, 2014). *Fiscal stress* secara umum dapat dipahami sebagai kegagalan aktual atau potensial suatu pemerintah dalam memenuhi satu atau lebih kondisi solvabilitas, keberlanjutan, fleksibilitas, dan kerentanan terhadap kesehatan fiskal (Levine *et al.*, 2013).

Menurut Menafe dkk. (2018), *fiscal stress* mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres yaitu adanya lebih banyak tuntutan terhadap pelayanan publik daripada ketersediaan uang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggarannya. Dalam kondisi *fiscal stress* pemerintah daerah dihadapkan pada dilema pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas (Novianti dan Khairudin,

2023). Lebih lanjut, Novianti dan Khairuddin (2023) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan upaya mengatasi *fiscal stress* melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi penggunaan sumber daya, mencari alternatif sumber penerimaan lain, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Lhutfi dkk. (2019) dalam hasil penelitiannya di Kota Yogyakarta dan Surakarta bahwa respon dari kedua kota tersebut terhadap *fiscal stress* yaitu: (1) pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD karena *fiscal stress* muncul disebabkan terbatasnya PAD untuk menutupi pengeluaran daerah. Semakin baik kemampuan daerah dalam optimalisasi PAD, maka semakin rendah pula potensi *fiscal stress* terhadap daerah. (2) pengurangan belanja daerah akan menanggapi *fiscal stress* dengan mendistribusikan belanja modal yang bersumber dari dana alokasi khusus dan mengurangi anggaran belanja sesuai dengan prioritas. (3) daerah akan mencairkan dana cadangan pada periode sebelumnya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan daerah. (4) pemberian pinjaman daerah yaitu kredit dapat diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (5) penurunan pelayanan masyarakat dengan mengurangi jam kerja, menghentikan layanan atau memberhentikan pekerja dan penghentian sementara.

Arnett (2011) merumuskan bahwa *fiscal stress* dapat diukur melalui selisih antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal ($FS = \text{Pendapatan Asli Daerah} - \text{Belanja Modal}$). Artinya, ketika PAD lebih besar dari total belanja modal maka indikasi *fiscal stress* pada daerah tersebut semakin kecil. Sebaliknya, ketika PAD lebih kecil dari total belanja modal maka indikasi *fiscal stress* pada daerah tersebut semakin tinggi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Sektor pendapatan memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Patadang dkk., 2021). Halim (2004) mendefinisikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari dan Iryanie, 2018). Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (Nasir, 2019). Carunia (2017) menyatakan bahwa jika tingkat pencapaiannya melebihi 70 persen dari total pendapatan daerah, maka pendapatan asli daerah dianggap layak untuk membiayai pembangunan daerah.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menyebabkan penambahan kekayaan atau aset daerah (Sofwan dan Octaviyanti, 2020). Berdasarkan Portal Pengadaan Barang dan Jasa, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti bangunan, peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membeli secara tunai ataupun cicill, menukarkan dengan aset lain, atau dengan membangun sendiri (Natasha dan Khadijah, 2022). Di sisi lain, belanja modal juga dapat menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Pamungkas (2020) bahwa perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi menimbulkan beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

2.1.4 Pertumbuhan PDRB

Solihin (2020) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan bagi masyarakat pada periode tertentu (Pratiwi dan Indrajaya, 2019). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran nyata tentang kebijakan pembangunan yang telah dilakukan, khususnya dalam bidang ekonomi. Hasibuan dkk. (2022) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi

suatu daerah digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muzdalifa dan Haryatningsih (2021) bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB.

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang mampu dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau daerah (Romhadhoni dkk., 2018). Menurut Hartono dkk. (2018) produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan akumulasi nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diciptakan oleh seluruh unit ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) merepresentasikan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Efendy, 2017; Arnova, 2023). Oleh karena itu, besaran PDRB yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya dan faktor produksi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Mangilaleng dkk. (2015) mengungkapkan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB suatu daerah, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Lebih lanjut, Mangilelang dkk. (2015) menjelaskan bahwa PDRB atas harga berlaku atau harga nominal adalah nilai tambah barang yang dihitung berdasarkan harga tahun berjalan, baik dalam produksi, konsumsi, atau menghitung nilai tambah. Adapun PDRB atas harga konstan atau harga riil adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun tertentu dan digunakan sebagai acuan atau tahun dasar ketika menghitung *output* yang akan digunakan.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Putra dkk. (2018) mengungkapkan bahwa sebagian dari upaya pemerintah dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk pembangunan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Todaro (2004) bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri dengan memainkan peranan penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai komponen kesejahteraan masyarakat. Menurut UNDP, indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu upaya penciptaan dan penyediaan peluang untuk perluasan penduduk (*enlarging people's*). IPM dibuat dengan maksud untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuan yang mereka miliki harus menjadi kriteria utama dalam menilai pembangunan suatu negara atau daerah bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana atas tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan (Pratowo, 2012). Menurut UNDP (2004) teori pembentukan IPM diukur dengan tiga dimensi yaitu; umur panjang dan sehat yang ditunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir yang dirumuskan menjadi angka harapan hidup; berdimensi Ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat kemampuan baca tulis dan rata-rata lama sekolah, kedua

komponen tersebut membentuk indeks pendidikan; serta dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita yang dibakukan dalam indeks pendapatan. Dengan demikian, IPM dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan sosial dan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, artinya semakin baik tingkat pencapaian pembangunan manusianya. Nilai IPM berkisar dari 0 sampai 100 dengan empat klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

No.	Klasifikasi	Capaian IPM
1.	Sangat tinggi	$IPM \geq 80$
2.	Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
3.	Sedang	$60 \leq IPM < 70$
4.	Rendah	$IPM < 60$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hadar dkk. (2020), Syifa dkk. (2021), dan Suryani dan Windijarto (2023) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Sebaliknya, penelitian Putra dkk. (2023) justru menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini, meningkatnya PAD yang digunakan untuk belanja modal tidak menjamin bahwa daerah tidak akan mengalami gejala *fiscal stress*. Di sisi lain, hasil penelitian Dwiyanti (2019) menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Hal ini terjadi

apabila kondisi perekonomian suatu daerah berada dalam kondisi ideal yaitu pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan, penelitian putri dkk. (2023) menunjukkan bahwa hanya belanja modal yang berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera periode 2019-2021 yang berkontribusi rata-rata sebesar 17% terhadap belanja daerah.

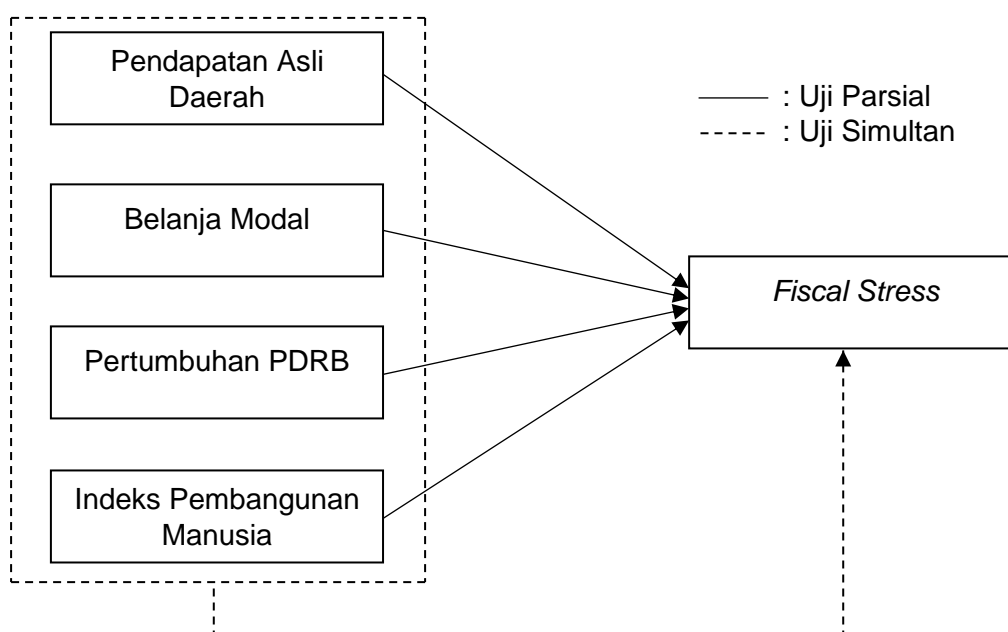
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi dkk. (2020) menunjukkan PAD dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, secara parsial hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penurunan belanja modal dan alokasi belanja modal minimum. Adapun penelitian Al-Hadar dkk. (2020) menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sanjaya dkk. (2020) yang juga menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Lebih lanjut, penelitian penelitian Sanjaya dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan PAD dan PDRB masing-masing tidak berpengaruh. Sebaliknya, penelitian Septira dan Prawira (2019) justru menunjukkan bahwa PAD dan PDRB secara parsial berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan belanja modal tidak berpengaruh.

Heriansyah (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia secara

parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2017. Hal ini disebabkan bahwa eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa meninjau peningkatan produktivitas masyarakat dan alokasi PAD dan belanja daerah tidak memengaruhi pelayanan publik.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mendanai barang dan pelayanan publik secara mandiri dengan menarik aliran pendapatan daerah yang potensial, diikuti dengan penganggaran yang cermat. *Fiscal stress* atau tekanan keuangan akan terjadi apabila pendanaan pemerintah gagal untuk memenuhi barang dan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan pemaparan kajian literatur, maka kerangka pikir penelitian yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawabannya berdasarkan teori, bukan situasi sesungguhnya. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan kajian di atas adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Teori Peacock dan Wiseman menekankan pada analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut teori Peacock dan Wiseman, pemerintah akan berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan meningkatkan penerimaan melalui penerimaan dari pajak. Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain yaitu, analisis penerimaan, analisis pengeluaran, dan analisis anggaran (Sari, 2021). Dalam analisis ini, komponen dalam penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Fiscal stress menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah gagal dalam menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan di daerahnya, dalam hal ini pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat (Handayani, 2020). Keadaan ini menunjukkan juga pemerintah daerah belum berhasil menggali potensi sumber-sumber penghasilan di daerah secara optimal untuk dipungut sebagai pendapatan asli daerah (Puspitorini dan Lenggogini, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga kondisi *fiscal stress* akan berkurang.

Menurut Rupilu dkk. (2019) pertumbuhan pendapatan asli daerah memiliki dampak terhadap *fiscal stress* daerah. Artinya, perubahan pada komponen

pendapatan asli daerah akan menyebabkan perubahan pada tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut. Lhutfi dkk. (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Hadar dkk. (2020) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2018. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Toeri Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak bersifat *continuous growth*. Artinya, pengeluaran pemerintah tidak mengalami pertumbuhan secara terus menerus karena didasarkan pada kebutuhan, termasuk pengeluaran untuk belanja modal Putra dkk. (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Selain ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, belanja modal juga ditujukan untuk berbagai jasa yang berkaitan dengan pemenuhan layanan kepada publik. Dengan begitu, *fiscal stress* dapat dipicu oleh perubahan belanja modal ketika belanja modal tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran, yaitu kondisi ketika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan (Hariani dan Febriyastuti, 2020). Dalam hal ini, *fiscal stress* dicerminkan dengan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sanjaya dkk. (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress* dengan indikasi bahwa setiap peningkatan belanja modal akan meningkatkan *fiscal stress* di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap *Fiscal Stress*

Teori Peacock dan Wiseman menekankan pada analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut teori Peacock dan Wiseman, pemerintah akan berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan meningkatkan penerimaan melalui penerimaan dari pajak. Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain yaitu, analisis penerimaan, analisis pengeluaran, dan analisis anggaran (Sari, 2021). Dalam analisis ini, salah satu komponen yang dapat memengaruhi kondisi keuangan pemerintah dari sisi penerimaan adalah pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto (PDRB) merepresentasikan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Efendy, 2017; Arnova, 2023). Oleh karena itu, besaran PDRB yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya dan faktor produksi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penelitian Dwitayanti dkk. (2019) mengungkapkan bahwa melalui peningkatan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*, dalam hal ini pengaruh tersebut mengakibatkan adanya perubahan dari penerimaan daerah yang akan menyebabkan perubahan pada tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh

daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syifa dkk. (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB suatu daerah akan menyebabkan peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat sehingga dapat mengurangi timbulnya fenomena *fiscal stress*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

2.4.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap *Fiscal Stress*

Teori Peacock dan Wiseman menekankan pada analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut teori Peacock dan Wiseman, pemerintah akan berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan meningkatkan penerimaan melalui penerimaan dari pajak. Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain yaitu, analisis penerimaan, analisis pengeluaran, dan analisis anggaran (Sari, 2021). Dalam analisis ini, komponen yang dianggap berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah baik dari sisi penerimaan, pengeluaran, maupun anggaran adalah kualitas sumber daya manusia.

Potensi ketersediaan sumber daya dan kesiapan wilayah merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu daerah di era otonomi daerah (Djani, 2022). Untuk mencapai daerah yang berkualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah menggunakan APBD untuk mendanai pembangunan sektor-sektor tersebut. Kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang rendah seringkali berdampak negatif terhadap rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat dan ketidakmampuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (Lie dkk.,

2022). Dalam penelitian Arina dkk. (2021) menjelaskan bahwa peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena dana yang dapat ditransfer ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan hibah menjadi terbatas. Selain itu, masalah yang dihadapi masyarakat daerah menjadi semakin kompleks dan pemecahannya membutuhkan keterlibatan aktif oleh masyarakat daerah. Sehingga peran keuangan daerah dapat memotivasi suatu wilayah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih realistis dan bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

2.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap *Fiscal Stress*

Teori Peacock dan Wiseman menekankan pada analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut teori Peacock dan Wiseman, pemerintah akan berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan meningkatkan penerimaan melalui penerimaan dari pajak. Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain yaitu, analisis penerimaan, analisis pengeluaran, dan analisis anggaran (Sari, 2021).

Timbulnya *fiscal stress* salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi atau pertumbuhan ekonomi yang menurun, korupsi, gaji yang tinggi untuk pengeluaran, tingginya pengeluaran, dan berkurangnya hasil pajak akibat kemunduran industri (Shamsud dan Akoto, 2004). Namun, *fiscal stress* tidak selalu berdampak negatif karena pemerintah daerah memiliki kecenderungan akan

menggali PAD secara lebih ketat untuk membiayai pengeluarannya ketika mengalami *fiscal stress* yang tinggi.

Potensi produk domestik regional bruto yang baik akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain arah pembangunan ekonomi mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat dan merata. Peningkatan pendapatan masyarakat juga dapat didorong oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri, termasuk pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan memengaruhi produktivitas dalam menggali sumber potensi yang ada di daerah, yang secara akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah serta mengurangi terjadinya fenomena *fiscal stress*. Hasil penelitian Sanjaya dkk. (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap *fiscal stress*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅ : Pertumbuhan pendapatan asli daerah, belanja modal, pendapatan domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress* Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.